

A large, dark silhouette of the Indonesian archipelago is centered in the background of the cover. It shows the main islands of Sumatra, Java, and Sulawesi, along with numerous smaller islands and surrounding waters.

Optimalisasi
Penerimaan Negara Sektor
**PERKEBUNAN
SAWIT**
Sulawesi Tengah

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

2020

Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Perkebunan Sawit SULAWESI TENGAH

Penulis :

**Linda Rosalina
Irlan
Muhammad Rizal**

Reviewer :

**Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS
Bimo Wijayanto, SE. MBA. PhD**



**Transformasi untuk Keadilan Indonesia
2020**

Daftar Isi

Daftar Tabel **iv**

Daftar Gambar **iv**

Daftar Singkatan **v**

Kata Pengantar **vi**

Pendahuluan **1**

Latar Belakang **1**

Tujuan **3**

Manfaat **3**

Ruang Lingkup **3**

Metode **4**

Lokasi dan Waktu **4**

Pengumpulan Data **4**

Analisis Data **4**

Hasil & Pembahasan **8**

Tutupan dan Status Tanaman Sawit **8**

Produksi Tandan Buah Segar **9**

Penerimaan Negara Atas Pajak Perkebunan Sawit **9**

Pengusahaan Perkebunan Sawit **11**

Sawit Dalam Kawasan Hutan **16**

Ulasan Data Tutupan Sawit **19**

Simpulan & Rekomendasi **21**

Simpulan **21**

Rekomendasi **22**

Daftar Pustaka **23**

Daftar Tabel

Tabel 1 Klasifikasi Umur Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan Nilai NDVI	5
Tabel 2 Tutupan Sawit Berdasarkan Status Tanaman Sawit Tahun 2019	8
Tabel 3 Hasil Dugaan Produksi CPO dan TBS Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019	9
Tabel 4 Total Penerimaan PBB dan PPN Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah 2019	10
Tabel 5 Penerimaan PBB Atas Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019	10
Tabel 6 Penerimaan PPN Atas Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019	11
Tabel 7 Luas HGU Perkebunan Besar Swasta Sulawesi Tengah Tahun 2019	12
Tabel 8 Pemegang HGU Perkebunan Besar Swasta Berdasarkan Luas Tutupan Sawit yang Mudah Teridentifikasi Tahun 2019	13
Tabel 9 Pemegang HGU Perkebunan Besar Swasta Berdasarkan Tutupan Sawit Yang Sulit Teridentifikasi Tahun 2019	14
Tabel 10 Pemegang HGU Perkebunan Besar Swasta Berdasarkan Tutupan Sawit Yang Sulit Teridentifikasi Tahun 2019	15
Tabel 11 Pemegang HGU Perkebunan Besar Negara Berdasarkan Tutupan Sawit yang Sulit Teridentifikasi	15
Tabel 12 Luas Tutupan Sawit Perkebunan Rakyat Tahun 2019	15
Tabel 13 Areal HGU Perkebunan Sawit di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2019	17
Tabel 14 Tutupan Sawit di Dalam Kawasan Perkebunan Rakyat Tahun 2019	17
Tabel 15 Tutupan Sawit di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2019	18
Tabel 16 Data Tutupan Sawit di Sulawesi Tengah Berdasarkan Sumber Data Tahun 2018	19

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian	4
Gambar 2 Alur Penelitian	7
Gambar 3 Tutupan Sawit Berdasarkan Kabupaten	8
Gambar 4 Peta Situasi Lokasi Penelitian	13
Gambar 5 Peta HGU di dalam kawasan hutan	16
Gambar 6 Peta Sebaran Tutupan Sawit Berdasarkan Kawasan Hutan	18

Daftar Singkatan

APL	: Area Penggunaan Lain
BKP	: Barang Kena Pajak
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
Ha	: Hektare
HGU	: Hak Guna Usaha
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
HPK	: Hutan Produksi Dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
KEMENTAN	: Kementerian Pertanian
KH	: Kawasan Hutan
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSA	: Kawasan Suaka Alam
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
NDVI	: <i>Normalize Differential Vegetation Index</i>
NJKP	: Nilai Jual Kena Pajak
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBN	: Perkebunan Besar Negara
PBS	: Perkebunan Besar Swasta
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PR	: Perkebunan Rakyat
PT	: Perseroan Terbatas
TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan
TBS	: Tandan Buah Segar
TM	: Tanaman Menghasilkan
TTM	: Tanaman Tidak Menghasilkan
WP	: Wajib Pajak

Kata Pengantar

Pada awalnya studi ini berangkat dari pencanangan target Pemerintah untuk mobilisasi penerimaan negara yang disampaikan Jokowi pada 2019 lalu. Target itu meliputi optimalisasi penerimaan perpajakan dan reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rendahnya realisasi penerimaan negara dari pajak sawit dan PNBP sumberdaya alam yang menyebabkan kerugian negara triliyunan rupiah menjadi perhatiannya. Terus terang dalam lima tahun ke belakang ini, TuK INDONESIA banyak bekerja di Sulawesi Tengah untuk sektor sawit. Sehingga pada Juni 2020, kami pun bersepakat menyusun studi untuk melihat potensi penerimaan pajak dari sektor ini.

Rupanya pandemi COVID-19 yang terjadi awal 2020 ini sangat membatasi ruang gerak kami, utamanya dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam situasi ini, terlalu berisiko untuk kami melakukan validasi lapangan, sehingga kami sadari terdapat deviasi dari informasi yang dihasilkan. Kemudian, penggunaan citra dengan resolusi rendah dan pemakaian asumsi nilai terendah dalam perhitungan pajak, kami juga sadari berimplikasi terhadap hasil perhitungan yang menjadi *under estimate*.

Terlepas dari kekurangannya, kami sangat meyakini bahwa penyusunan studi ini penting untuk tetap dilakukan. Setidaknya didasarkan atas empat hal: Pertama, selama kami bekerja di Sulawesi Tengah, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun teman-teman CSO, tidak pernah mengetahui seberapa besar potensi penerimaan negara untuk sektor sawit di Sulawesi Tengah. Ketidadaan akan transparansi informasi publik masih menjadi persoalan dasar yang tidak kunjung terselesaikan. Bahkan ketertutupan akses informasi diantara sesama instansi pemerintahan pun terjadi disana.

Kedua, studi ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tengah. Studi ORI Sulteng pada 2018, menemukan banyak sekali maladministrasi dalam perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Tolitoli dan Morowali Utara. Temuan ORI Sulteng pada aspek pendapatan meliputi ketidakcermatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam melakukan verifikasi luasan objek pajak PBB-P3, sebagian lahan perkebunan sawit masih terdaftar sebagai objek pajak PBB-P2, banyak perusahaan tidak membayar PPN kayu pada lahan yang telah di *land clearing*, juga soal verifikasi data produksi dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang belum maksi-

mal. Sederet problematika tersebut tentu berpotensi menghilangkan penerimaan negara.

Ketiga, studi ini dirasa penting untuk menyajikan informasi dasar (*baseline*) mengenai potret kondisi eksisting perkebunan sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng). Informasi ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan dan memutuskan pembangunan perkebunan sawit di Sulteng. Keempat, studi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam memonitoring kinerja dari perkebunan dan industri sawit yang berkembang di Sulteng.

Informasi dari studi ini masih bersifat indikatif (dugaan), dan tersusun atas enam informasi penting. Enam paparan informasi tersebut meliputi: (1) tutupan dan status tanaman sawit, (2) produksi tandan buah segar, (3) penerimaan negara atas pajak sawit, (4) pengusahaan perkebunan sawit, (5) sawit dalam kawasan hutan, dan (6) ulasan data tutupan sawit.

Pada akhirnya, hadirnya studi ini adalah hasil kerja keras bersama. Maka kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis, utamanya dalam proses pengumpulan hingga pengolahan data yang kami pahami penuh keterbatasan. Khususnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS dan Bimo Wijayanto, SE. MBA. PhD, yang berkenan menjadi teman diskusi sekaligus *reviewer* dalam studi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Auriga Nusantara dan WALHI Sulawesi Tengah yang bersedia berbagi informasi yang dimiliki mengenai perkebunan sawit di Sulteng. Terima kasih sedalam-dalamnya juga kepada teman-teman yang sudah menyediakan ruang, waktu dan sumberdaya untuk membahas studi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Semoga studi ini bermanfaat dan semoga dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan sawit di Sulawesi Tengah.

Selamat menikmati di setiap informasinya.

Jakarta, Oktober 2020

Edi Sutrisno

Direktur Eksekutif TuK INDONESIA

Pendahuluan

Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk Indonesia. Sektor ini dapat bertumbuh meskipun dalam kondisi krisis akibat pandemi corona virus 2019 (Covid-19) disaat sektor lain mengalami kontraksi (BPS 2020). Pada tahun 2018, sektor pertanian menempati urutan ketiga penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sekitar 12,81% (BPS 2019). Tenaga kerja pada sektor pertanian merupakan yang terbesar dengan persentase 20,70% dari jumlah tenaga kerja Indonesia per Februari 2020 (Sekjen kementan 2020). Salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian adalah perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia (Index Mundi, 2020). Selain itu, minyak sawit juga menyumbangkan sekitar 17% dari total pendapatan pada sektor pertanian (Acosta & Curt 2019).

Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, luas area perkebunan sawit Indonesia tercatat 12,76 juta ha atau mengalami peningkatan 3,06% dari tahun 2017 yaitu 12,38 juta ha (BPS 2019). Area perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri atas 49,81% perkebunan besar swasta (PBS), perkebunan rakyat 45,54 % dan perkebunan besar negara 4,65% (BPS 2019). Besarnya potensi perkebunan kelapa sawit memberi gambaran besarnya potensi penerimaan negara dari sektor ini.

Salah satu bentuk penerimaan negara yang dapat diperoleh dari sektor perkebunan sawit adalah penerimaan negara atas pajak. Jenis pajak yang dapat dipungut dari usaha perkebunan kelapa sawit meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Soedomo *et al.* 2018). Penerimaan negara atas pajak pada sektor perkebunan sawit ini dapat membantu dalam mengontrol perluasan lahan dan mendukung model bisnis yang lebih berkelanjutan (CPI 2015). CPI (2015) juga menyebutkan bahwa pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk mengkompensasi dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kelapa sawit.

Meskipun potensi penerimaan negara atas pajak perkebunan sawit ini besar, namun masih dinilai belum optimal. Laporan CPI (2015) menyebutkan bahwa potensi penerimaan negara atas pajak pada sektor perkebunan sawit di Indonesia berkisar antara Rp 7,89–10,01

triliun pada tahun 2012–2013. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 melaporkan bahwa penerimaan negara atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sawit lebih rendah dari nilai yang seharusnya diperoleh yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 17,80 triliun. Nilai tersebut belum menghitung kemungkinan wajib pajak (WP) di sektor perkebunan sawit yang tidak terdeteksi oleh pemerintah.

Pemungutan pajak yang tidak optimal dari perkebunan sawit menyebabkan kehilangan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan potret dari kegagalan dalam tata kelola sawit. Kegagalan tersebut tercermin dari temuan KPK (2018) dalam sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan yang tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor sawit, dan tidak optimalnya pungutan pajak sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apabila kondisi demikian terus dibiarkan, negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan yang jauh lebih besar.

Penelitian terkait pendugaan potensi penerimaan negara atas pajak perkebunan sawit belum banyak dilakukan. Keterbatasan terhadap akses data perkebunan sawit dan perbedaan data antar instansi pemerintah menjadi kendala dalam perhitungan potensi pajak tersebut. Pendugaan potensi penerimaan pajak perkebunan sawit sangat ditentukan oleh ketersediaan data seperti areal produktif perkebunan sawit (perhitungan PBB), peredaran bruto perusahaan (perhitungan PPh) dan produksi TBS (perhitungan PPN). Areal produktif perkebunan merupakan areal yang telah ditanami tanaman (Pasal 14 ayat (1) PMK 186/2019) meliputi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Saat ini, identifikasi terhadap areal produktif perkebunan sawit dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh (LAPAN 2014). Data areal produktif perkebunan sawit dapat digunakan untuk menduga potensi penerimaan negara atas PBB dan PPN. Namun sulit untuk memperoleh data terkait peredaran bruto dari perusahaan perkebunan sawit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis citra satelit untuk mengetahui tutupan dan status tanaman sawit di Sulawesi Tengah. Data tutupan dan status tanaman sawit akan digunakan untuk menghitung penerimaan negara atas pajak khususnya Pajak Bumi & bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan areal produktif perkebunan sawit. Hasil tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi penerimaan negara dari investasi sawit di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu juga, studi ini akan berusaha mengidentifikasi faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi sistem perusahaan kebun sawit, yang kemudian kajian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit khususnya terkait mekanisme perhitungan penerimaan negara atas pajak.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan negara dari perkebunan sawit di Provinsi Sulawesi Tengah 2019 menggunakan pendekatan berbasis penginderaan jauh.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengusahaan tanaman sawit melalui penggunaan metode pemungutan pajak yang efisien dan efektif. Metode pengumpulan data tutupan dan status tanaman sawit yang efisien dan akurat diharapkan dapat mendorong praktek tatakelola sawit yang lebih baik bagi para pelaku usaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan dalam proses pungutan pajak dari sektor sawit.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi areal yang memiliki tutupan sawit serta areal yang telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019.

Metode

Lokasi dan Waktu

Studi ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu pelaksanaan studi dilakukan pada Juni–September 2020. Peta lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan penelitian ini adalah Data Citra Landsat 8 liputan 2019 yang telah terkoreksi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peta tutupan sawit 2018, peta Hak Guna Usaha (HGU), peta kawasan hutan 2014, peta administrasi 2019 dan data produksi *Crude Palm Oil* (CPO) Sulawesi Tengah tahun 2018. Peta tutupan sawit dan HGU disediakan oleh Auriga Nusantara. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 869/Menhut-II/2014 diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data administrasi desa diperoleh dari Pendudukan dan Catatan Sipil. Sementara untuk data produksi CPO diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada studi ini meliputi:

a. Klasifikasi Tutupan Sawit dan Status Tanaman Sawit

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tutupan sawit berdasarkan status tanaman sawit di Sulawesi Tengah tahun 2019. Metode yang digunakan untuk mengetahui status atau umur tanaman sawit adalah metode berbasis penginderaan jauh (*remote sensing*) dengan memanfaatkan nilai spektral pada Citra Landsat 8 tahun 2019.

Nilai spektral dari citra tersebut kemudian ditransformasi menjadi indeks vegetasi yang nantinya akan menjadi dasar dalam klasifikasi tutupan sawit maupun status tanaman kelapa sawit. Indeks vegetasi yang seringkali digunakan dalam klasifikasi tutupan lahan adalah NDVI

(*Normalize Differential Vegetation Index*).

Lapan (2015) telah melakukan klasifikasi mengenai umur tanaman kelapa sawit melalui nilai NDVI. Klasifikasi umur tanam kelapa sawit berdasarkan NDVI dapat dilihat pada Tabel 1.

No.	Level (Umur) Kelapa Sawit	Nilai NDVI
1.	Baru dibuka	128 – 130
2.	Muda 1	> 130 – 135
3.	Muda 2	> 135 – 140
4.	Sedang	> 141 – 144
5.	Tua	> 145 – 147

Tabel 1 Klasifikasi Umur Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan Nilai NDVI

Tahapan dalam klasifikasi ini meliputi: (i) pembuatan citra sintetis *Normalize Differential Vegetation Index* (NDVI) dari citra Landsat 8 terkoreksi; (ii) penentuan nilai ambang batas status atau tanaman sawit berdasarkan nilai piksel citra NDVI; (iii) *overlay* citra NDVI dengan tutupan sawit eksisting 2018 dari Auriga Nusantara; (iv) perhitungan luas masing-masing kelas status tanaman sawit.

b. Penentuan Produksi Tandan Buah Segar Sawit

Penentuan jumlah produksi TBS dilakukan menggunakan pendekatan tingkat ekstraksi CPO (*oil extraction rate-OER*). Tingkat OER yang digunakan untuk menentukan produksi TBS adalah 20%. Jumlah produksi TBS yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan produktivitas TBS (ton/ha) Sulawesi Tengah tahun 2018. Produksi TBS 2019 diperoleh dengan mengalikan produktivitas TBS tahun 2018 dengan total luas areal tanaman menghasilkan (TM).

c. Perhitungan Pajak Perkebunan Sawit

Jenis pajak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara untuk Pajak Penghasilan (PPH) tidak dianalisis karena keterbatasan akses data dalam penentuan peredaran bruto.

a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan (Sudomo *et. al* 2018). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Perhitungan besaran PBB dilakukan menggunakan persamaan:

$$NJKP = 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

Dimana tarif PBB telah ditetapkan sebesar 0.5%. Tarif NJKP adalah Nilai Jual Kena Pajak yang telah ditetapkan sebesar 40% dari nilai NJOP. NJOP sendiri adalah nilai jual objek pajak.

Harga NJOP untuk lahan perkebunan telah ditetapkan melalui Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Harga NJOP untuk perkebunan yang digunakan dalam studi ini adalah kelas terendah (klas 200) dengan harga 140 Rp/m². NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

Perhitungan PBB hanya dilakukan pada NJOP bumi dan tidak dilakukan pada NJOP bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, NJOP bumi Sektor Perkebunan meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman dan areal emplasemen. Perhitungan nilai PBB dilakukan pada areal produktif perkebunan sawit. Areal produktif merupakan areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman meliputi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman tidak menghasilkan (TTM).

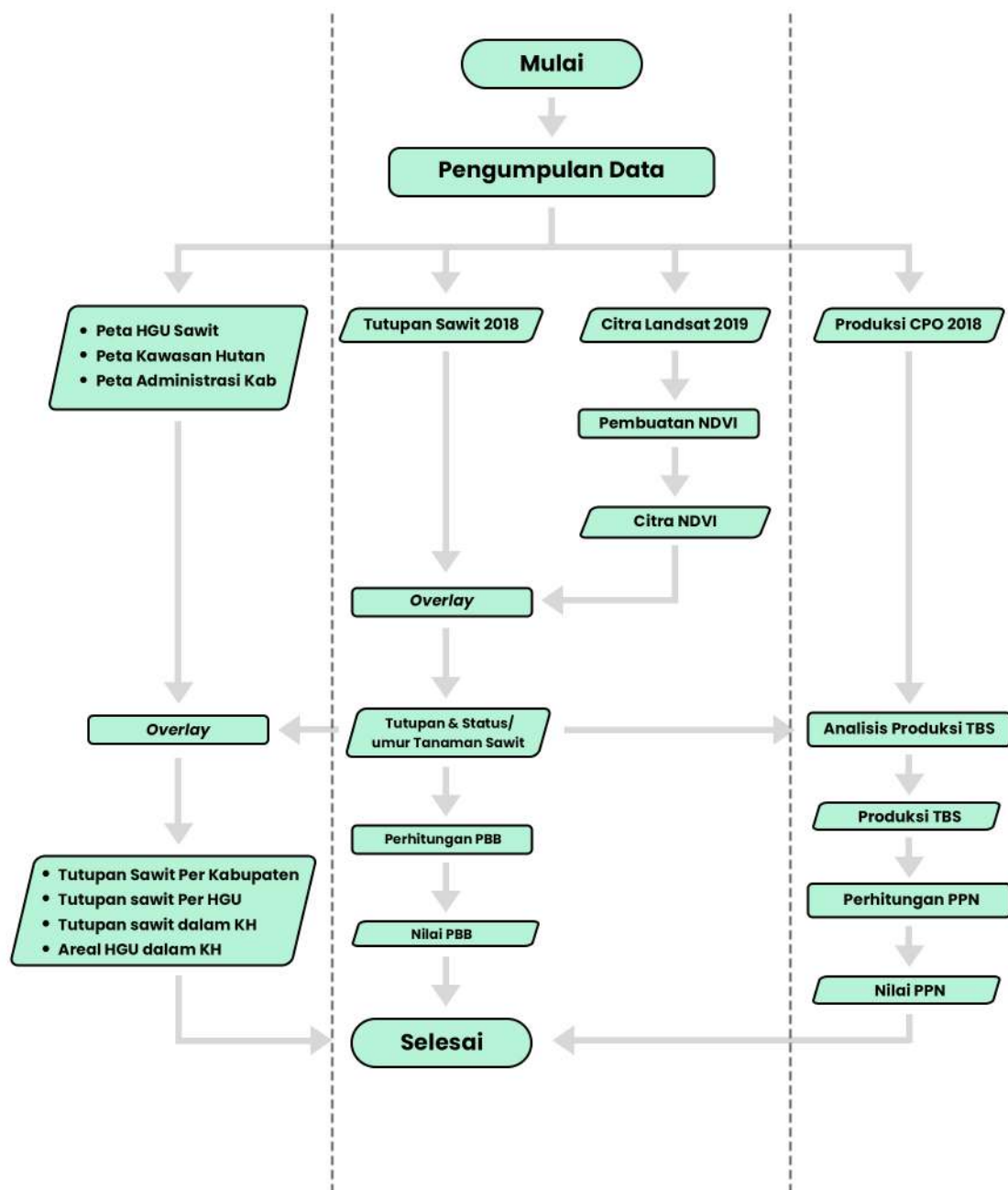
b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan besaran PPN dilakukan menggunakan persamaan:

$$PPN = \text{Tarif} \times \text{Produksi TBS} \times \text{Harga TBS per Satuan}$$

Dimana PPN adalah besaran pajak pertambahan nilai (rupiah), Tarif adalah persentase biaya PPN (10%), produksi TBS adalah jumlah tandan buah segar sawit dalam satuan ton dan harga TBS adalah harga tandan buah segar per ton dengan asumsi telah dikurangi biaya penanaman, perawatan dan lain-lain. Sementara itu, harga TBS telah ditentukan yaitu 1.000 Rp/kg.

Gambar 2 Alur Penelitian



Hasil & Pembahasan

Tutupan dan Status Tanaman Sawit

Hasil klasifikasi tutupan sawit dan status tanaman sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1. Luas keseluruhan tutupan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu 75.225,94 ha. Kabupaten dengan tutupan sawit terluas adalah Morowali Utara (25.227 ha). Sementara itu, kabupaten dengan luasan tutupan sawit terkecil adalah Tojo Una-Una (128,67 ha).

Tabel 2 Tutupan Sawit Berdasarkan Status Tanaman Sawit Tahun 2019

No.	Kabupaten	Tutupan Sawit (ha)			
		TBM	TM	TTM	Total
1.	Banggai	3.351,42	4.298,89	6.451,35	14.101,65
2.	Buol	2.093,10	2.575,19	9.361,25	14.029,54
3.	Donggala	707,84	691,11	5.803,62	7.202,56
4.	Morowali	1.878,64	3.774,56	4.252,94	9.906,14
5.	Morowali Utara	7.049,43	8.229,00	9.948,57	25.227,00
6.	Parigi Moutong	63,67	473,89	35,30	572,85
7.	Poso	1.162,53	929,67	886,42	2.978,63
8.	Tojo Una-Una	42,88	40,96	44,83	128,67
9.	Tolitoli	385,87	371,15	321,88	1.078,90
Total		16.735,37	21.384,40	37.106,16	75.225,94
Persentase		22,25%	28,43%	49,33%	100,00%

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Klasifikasi tutupan sawit berdasarkan status tanaman sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 menunjukkan bahwa tanaman sawit tidak menghasilkan (TTM) memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman sawit menghasilkan (TM). Luas areal TTM, tanaman sawit belum menghasilkan (TBM) dan TM secara berurutan yaitu 37.106,16 ha (49,33%), 21.384,40 ha (28,43%) dan 16.735,37 ha (22,25%).



Gambar 3 Tutupan Sawit Berdasarkan Kabupaten

Produksi Tandan Buah Segar

Penentuan jumlah produksi tandan buah segar (TBS) dilakukan berdasarkan luas area tanaman sawit menghasilkan (TM) hasil klasifikasi dan tingkat produktivitas perkebunan sawit Sulawesi Tengah dalam menghasilkan TBS per tahun. Luas keseluruhan areal TM perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu 21.384,40 ha (Tabel 1). Produktivitas perkebunan sawit Sulawesi Tengah dalam menghasilkan TBS tahun 2018 yaitu 13.90 ton/ha. Jumlah produksi TBS tahun 2019 diperoleh dengan mengalikan luas keseluruhan areal tanaman sawit dengan produktivitas TBS per hektar perkebunan sawit Sulawesi tengah tahun 2018. Hasil pendugaan produksi TBS perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Dugaan Produksi CPO dan TBS Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Kabupaten	TM (ha)	Produksi CPO (ton)	Produksi TBS (ton)
1.	Banggai	4.298,89	11.946,60	59.733,01
2.	Buol	2.575,19	7.156,45	35.782,26
3.	Donggala	691,11	1.920,58	9.602,92
4.	Morowali	3.774,56	10.489,49	52.447,46
5.	Morowali Utara	8.229,00	22.868,38	114.341,91
6.	Parigi Moutong	473,89	1.316,93	6.584,65
7.	Poso	929,67	2.583,55	12.917,77
8.	Tojo Una–Una	40,96	113,84	569,18
9.	Tolitoli	371,15	1.031,43	5.157,14
Total		21.384,40	59.427,26	297.136,31

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Hasil dugaan produksi TBS perkebunan sawit secara keseluruhan di Sulawesi Tengah tahun 2019 adalah 297.136,31 ton. Produksi TBS tertinggi diperoleh dari Kabupaten Morowali Utara sebesar 114.341,91 ton. Sementara produksi TBS terendah yaitu Kabupaten Tojo Una–Una sebesar 569,18 ton.

Penerimaan Negara Atas Pajak Perkebunan Sawit

Penerimaan negara atas pajak (PBB dan PPN) atas perkebunan sawit dapat dilihat pada Tabel 4. Secara keseluruhan, penerimaan negara atas pajak perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu Rp 32.124.558.366,20. Pajak bumi dan bangunan menyumbangkan

7,50% penerimaan negara atas pajak perkebunan sawit. Adapun nilai PPN perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 sebesar 92,50%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari PPN memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai PBB.

Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Persentase (%)
PBB	2.410.927.803,17	7.50
PPN	29.713.630.563,02	92.50
Total	32.124.558.366,20	100.00

Tabel 4 Total Penerimaan PBB dan PPN Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah 2019

Hasil pendugaan Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini hanya menghitung berdasarkan **objek pajak areal produktif**. Sementara objek PBB lainnya seperti areal belum produktif, areal pengaman, dan areal emplasmen tidak dihitung. Selain itu, asumsi yang digunakan dalam perhitungan PBB merupakan asumsi paling minimal. Penggunaan asumsi minimal tersebut dilakukan karena keterbatasan data terkait harga tanah sejenis atau NJOP perkebunan sawit di Sulawesi Tengah tahun 2019.

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara atas Pajak Bumi & Bangunan (PBB) perkebunan kelapa sawit tahun 2019 berdasarkan wilayah kabupaten dapat dilihat pada Tabel 5. Penerimaan negara atas pungutan PBB perkebunan sawit secara keseluruhan yaitu Rp 2.410.927.803,17. Rata-rata PBB per hektare yang diperoleh dari hasil perhitungan PBB yaitu 36.764,11 Rp/ha.

Tabel 5 Penerimaan PBB Atas Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Kabupaten	PBB (Rp)	PBB Per Hektare (Rp/ha)
1.	Banggai	481.216.116,40	34.124,81
2.	Buol	307.822.702,95	21.941,04
3.	Donggala	98.947.767,67	13.737,86
4.	Morowali	366.710.854,82	37.018,54
5.	Morowali Utara	945.335.679,74	37.473,17
6.	Parigi Moutong	36.250.792,63	63.281,03
7.	Poso	123.979.153,36	41.622,93
8.	Tojo Una-Una	5.072.178,60	39.419,09
9.	Tolitoli	45.592.557,00	42.258,51
Total		*2.410.927.803,17	**36.764,11

Keterangan: ---- *Total PBB, ** Rata-rata PBB per hektar

Sumber: Hasil Olahan (2019)

2. Pajak Pertambahan Nilai

Komoditas perkebunan sawit yang menjadi barang kena pajak adalah TBS. Hal ini telah diatur melalui Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014 tentang pelaksanaan putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN. Penerimaan negara atas PPN perkebunan kelapa sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Penerimaan PPN Atas Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Kabupaten	PPN (Rp)
1.	Banggai	5.973.301.337,16
2.	Buoi	3.578.225.828,23
3.	Donggala	960.292.002,08
4.	Morowali	5.244.746.389,97
5.	Morowali Utara	11.434.191.435,23
6.	Parigi Moutong	658.464.940,68
7.	Poso	1.291.777.202,96
8.	Tojo Una-Una	56.917.684,48
9.	Tolitoli	515.713.742,24
Total		29.713.630.563,02

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Besaran penerimaan PPN sangat ditentukan oleh luas areal tanaman menghasilkan (TM) dan harga TBS sangat mempengaruhi nilai PPN perkebunan sawit. Areal TBM dan TTM tidak dimasukkan dalam perhitungan karena diasumsikan belum menghasilkan dan atau tidak menghasilkan TBS. Produksi TBS perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 berdasarkan luas areal TM yaitu 297.136,31 ton. Dengan luasan areal TM tersebut, diperoleh besaran penerimaan negara atas PPN perkebunan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu Rp 29.713.630.563,02. Nilai PPN perkebunan sawit tertinggi diperoleh dari Morowali Utara yaitu Rp 11.434.191.435,23 atau 38% dari keseluruhan penerimaan.

Pengusahaan Perkebunan Sawit

1. Perkebunan Besar Swasta (PBS)

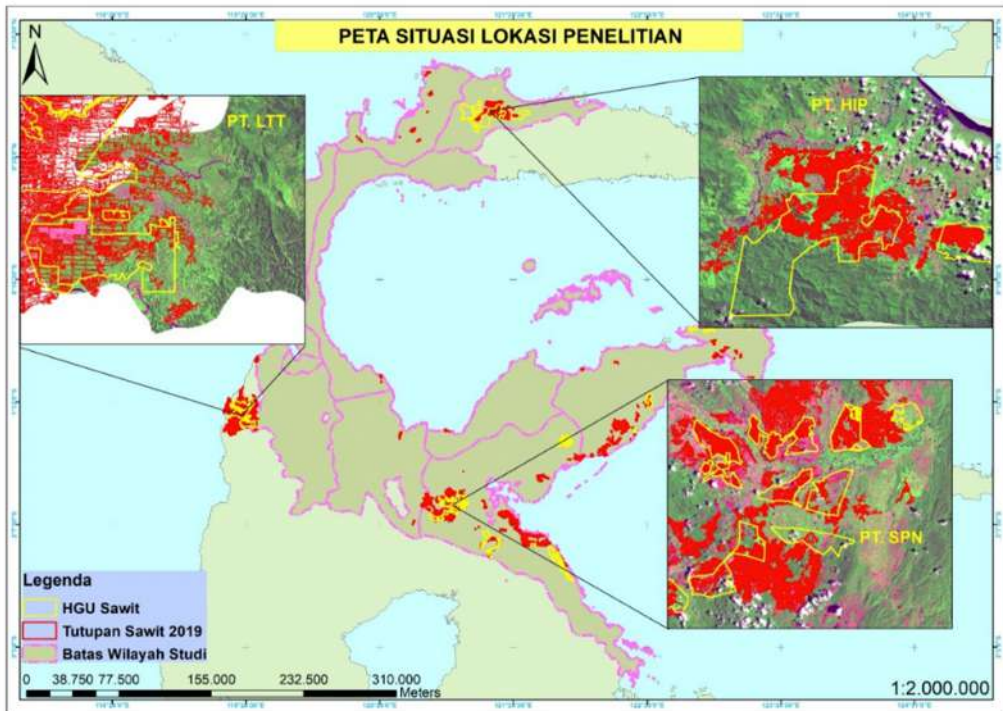
Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sawit Sulawesi Tengah yang berhasil diidentifikasi berdasarkan data yang disediakan oleh Auriga Nusantara dan WALHI Sulawesi Tengah adalah 19 HGU sawit dengan luas 113.033,04 ha. Nama pemegang hak dan luas areal HGU sawit dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Luas HGU Perkebunan Besar Swasta Sulawesi Tengah Tahun 2019

No.	Kabupaten	Luas (Ha)
1.	PT. Hardaya Inti Plantation	23.061,91
2.	PT. Sonokeling Buana	16.473,49
3.	PT. Sinergi Perkebunan Nusantara	11.575,67
4.	PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam	9.087,61
5.	PT. Pasangkayu	8.914,13
6.	PT. Wira Mas Permai	8.787,32
7.	PT. Mamuang	8.200,62
8.	PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	6.989,73
9.	PT. Karunia Alam Makmur	5.796,42
10.	Lestari Tani Teladan	5.081,63
11.	PT. Delta Subur Permai	4.068,35
12.	PT. Lestari Tadi Teladan	1.339,99
13.	PT. Kirana Sinar Gemilang	1.122,40
14.	PT. Tamaco Graha Krida	794,94
15.	PT. Cipta Agro Nusantara	775,99
16.	PT. Kurnia Luwuk Sejati	616,12
17.	Koperasi Plasma Sawit "Sumber Sejahtera"	292,28
18.	PT. Fitron Windu Utama	39,74
19.	PT. Batu Kapal	14,70
Total		113.033,04

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Berdasarkan kondisi tutupan sawit perkebunan besar swasta (PBS), terdapat tutupan sawit yang berada di dalam dan luar areal HGU (Gambar 4). Tutupan sawit yang berada di luar areal HGU memiliki dua kategori yaitu tutupan sawit yang mudah diidentifikasi dan sulit diidentifikasi. Tutupan sawit yang mudah diidentifikasi adalah tutupan sawit yang berada di luar areal HGU dan masih merupakan kesatuan dengan tutupan sawit yang berada di dalam areal HGU.



Gambar 4 Peta Situasi Lokasi Penelitian

Jumlah pemegang HGU yang termasuk dalam kategori mudah teridentifikasi baik di dalam maupun luar areal HGU diperoleh tujuh perusahaan. Total tutupan sawit di dalam areal dan luar HGU masing-masing 3,055.19 ha (47.57%) dan 3,367.19 (52.43%). Tutupan sawit yang mudah diidentifikasi berdasarkan areal HGU secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 8.

No.	Pemegang Hak	Tutupan Sawit (ha)		Total (ha)
		Dalam HGU	Luar HGU	
1.	PT. Wira Mas Permai	1.460,94	685,44	2.146,38
2.	PT. Delta Subur Permai	822,83	158,90	981,73
3.	PT. Kurnia Luwuk Sejati	115,61	740,41	856,02
4.	PT. Sonokeling Buana	70,68	669,34	740,01
5.	Lestari Tani Teladan	50,21	616,72	666,93
6.	PT. Kirana Sinar Gemilang	348,64	252,92	601,56
7.	PT. Kurnia Luwuk Sejati	186,29	243,47	429,76
Total (ha)		3.055,19	3.367,19	6.422,38
Presentase (%)		47,57%	52.43%	100%

Tabel 8 Pemegang HGU Perkebunan Besar Swasta Berdasarkan Luas Tutupan Sawit yang Mudah Teridentifikasi Tahun 2019

Sementara itu, tutupan sawit yang sulit diidentifikasi berdasarkan HGU adalah tutupan sawit yang saling tumpang tindih atau berdekatan dengan dua atau lebih areal HGU perkebunan sawit. Jumlah pemegang HGU dan tutupan sawit yang termasuk kategori sulit diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Pemegang HGU Perkebunan Besar Swasta Berdasarkan Tutupan Sawit Yang Sulit Teridentifikasi Tahun 2019

1.	Pemegang Hak	PT. Kirana Sinar Gemilang	Tutupan HGU (ha)	Dalam HGU	124,08	Luar HGU	20.445,82	Total (ha)	21.318,44
		PT. Tamaco Graha Krida		Dalam HGU	748,54				
		PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam	Tutupan HGU (ha)	Dalam HGU	423,29	Luar HGU	260,01	Total (ha)	701,34
		PT. Kirana Sinar Gemilang		Dalam HGU	18,04				
		Koperasi Plasma Sawit "Sumber Sejahtera"	Tutupan HGU (ha)	Dalam HGU	288,78	Luar HGU	1.048,50	Total (ha)	2.612,56
		PT. Cipta Agro Nusantara		Dalam HGU	753,92				
		PT. Kirana Sinar Gemilang		Dalam HGU	521,36				
		PT. Sonokeling Buana	Tutupan HGU (ha)	Dalam HGU	0,06	Luar HGU	7.720,01	Total (ha)	16.162,73
		PT. Hardaya Inti Plantation		Dalam HGU	8.442,66				
		3.		Lestari Tani Teladan	Tutupan HGU (ha)	Dalam HGU	3.448,04	Luar HGU	31.482,78
PT Mamuang	Dalam HGU			7.600,76					
PT Pasangkayu	Dalam HGU			7.031,19					
PT. Lestari Tadi Teladan	Dalam HGU			578,26					
PT. Lestari Tani Teladan	Dalam HGU			726,63					
Total Keseluruhan (ha)									
		Dalam HGU	30.705,61		Luar HGU	60.957,12		Total	91.662,73

2. Perkebunan Besar Negara (PBN)

Salah satu bentuk pengusahaan perkebunan sawit adalah perkebunan besar negara (PBN). Hanya satu perkebunan besar negara (PBN) perkebunan sawit yang terdapat di Sulawesi Tengah yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero). Luas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yaitu 6.989,73 ha (Auriga Nusantara 2018). Adapun luas tutupan sawit yang mudah teridentifikasi pada areal HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Pemegang HGU Perkebunan Besar Negara Berdasarkan Tutupan Sawit yang Mudah Teridentifikasi

No.	Pemegang Hak	Tutupan Sawit (ha)		Total (ha)
		Dalam HGU	Luar HGU	
1.	PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	71,36	673,91	745,27
Total		71,36	673,91	745,27

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Tutupan sawit yang sulit teridentifikasi pada areal HGU perkebunan besar negara dapat dilihat pada Tabel 11. Terdapat tutupan sawit dengan luas 14.429,50 ha yang tidak dapat diidentifikasi sebagai tutupan sawit pada areal PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero). Hal ini dikarenakan pada tutupan sawit tersebut saling tumpang tindih dengan areal HGU perusahaan lain (PT. Sinergi Perkebunan Nusantara).

Tabel 11 Pemegang HGU Perkebunan Besar Negara Berdasarkan Tutupan Sawit yang Sulit Teridentifikasi

No.	Pemegang Hak	Tutupan Sawit (ha)		Total (ha)
		Dalam HGU	Luar HGU	
1.	PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	1.449,92	14.429,50	21.173,84
	PT. Sinergi Perkebunan Nusantara	5.294,41		
Total		6,744.34	14.429,50	21.173,84

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Hasil klasifikasi yang diperoleh dari penelitian ini berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Dalam laporan BPS (2018) menunjukkan bahwa tidak ada tutupan sawit di dalam perkebunan besar negara (PBN) di Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat tutupan sawit yang berada di luar areal HGU yaitu HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

3. Perkebunan Rakyat (PR)

Perkebunan rakyat (*smallholder*) adalah perkebunan sawit yang dikelola oleh masyarakat dengan batasan luas areal perkebunan kurang dari 25 hektare. Luas keseluruhan tutupan sawit perkebunan rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu 4.788,51 ha. Kabupaten yang memiliki perkebunan rakyat terluas adalah Morowali Utara (28,44%). Sementara itu, kabupaten dengan luas perkebunan rakyat terkecil adalah Tojo Una-una. Luas areal perkebunan rakyat berdasarkan wilayah kabupaten lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 12.

No.	Kabupaten	Luas (ha)
1.	Banggai	705.94
2.	Buol	390.86
3.	Donggala	613.21
4.	Morowali	944.90
5.	Morowali Utara	1,361.64
6.	Parigi Moutong	137.65
7.	Poso	309.38
8.	Tojo Una-Una	33.08
9.	Tolitoli	291.85
Total		4,788.51

Tabel 12 Luas Tutupan Sawit Perkebunan Rakyat Tahun 2019

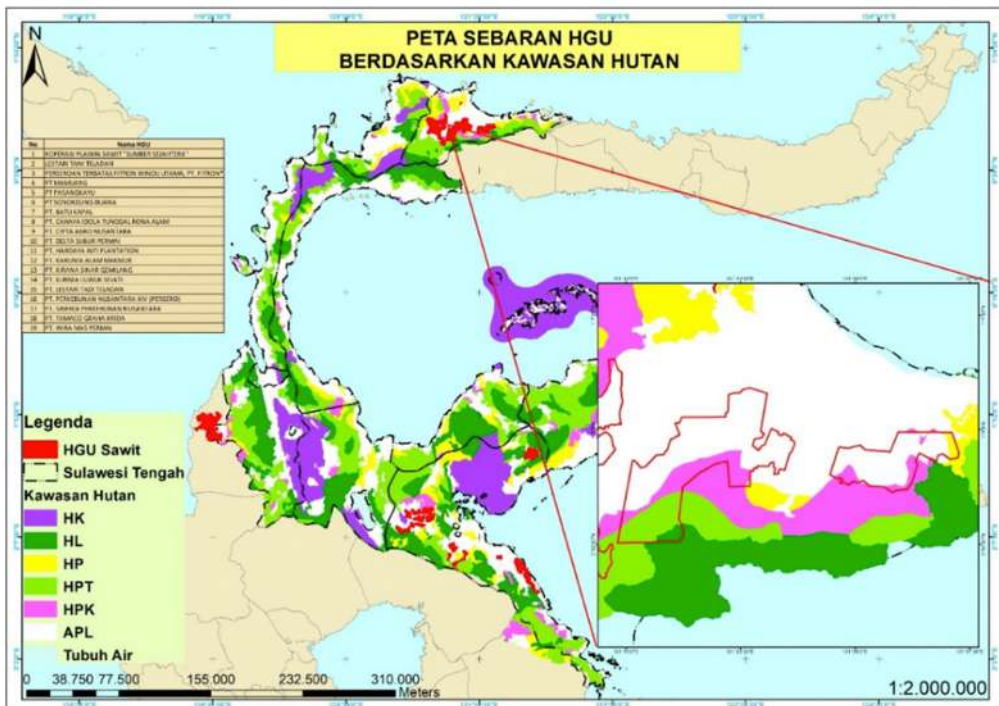
Sumber: Hasil Olahan (2019)

Sawit Dalam Kawasan Hutan

1. PBS dan PBN Dalam Kawasan Hutan

Konsesi perkebunan sawit merupakan salah satu sektor penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Hutan merupakan sumber lahan utama untuk perkebunan sawit (Carlson *et al.* 2012). Deforestasi yang terjadi akibat konversi perkebunan sawit dalam kurun waktu 2000– 2010 mencapai 1,60 juta ha atau 11% dari total deforestasi Indonesia (Abood *et al.* 2015). Penetapan areal HGU perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan areal kawasan hutan dapat menjadi faktor meningkatnya deforestasi dari sektor perkebunan sawit.

Hasil identifikasi areal HGU perkebunan sawit Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa masih terdapat HGU perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan (Gambar 5). Luas areal HGU perkebunan sawit di dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 12. Luas areal HGU perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan yaitu 9.531,30 ha (6,19%). Luas HGU sawit di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dapat dikonversi (HPK) memiliki luasan terbesar 5,846.97 ha. Pada hutan lindung, luas HGU perkebunan sawit yang diperoleh yaitu 3,363.19 ha. Sementara itu pada hutan konservasi (KSA/KPA) memiliki luasan terendah (151,10 ha).



Gambar 5 Peta HGU di dalam kawasan hutan

Tabel 13 Areal HGU Perkebunan Sawit di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2019

No.	Pemegang Hak	Kawasan Hutan (ha)					
		APL	HPK	HPT	HP	HL	KSA/KPA
1.	Koperasi Plasma Sawit "Sumber Sejahtera"	292.28					
2.	Lestari Tani Teladan	4,237.42					
3.	PT. Fitron Windu Utama	39.74					
4.	PT. Mamuang	69.76					
5.	PT. Sonokeling Buana	12,642.07	281.35	1,139.96	2,410.11		
6.	PT. Batu Kapal	8.97			5.73		
7.	PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam	9,064.94				22.67	
8.	PT. Cipta Agro Nusantara	775.99			0.00		
9.	PT. Delta Subur Permai	4,013.42	38.20	16.73			
10.	PT. Hardaya Inti Plantation	15,632.91	3,869.04	2,750.25	348.51	461.24	
11.	PT. Karunia Alam Makmur	5,796.42					
12.	PT. Kirana Sinar Gemilang	1,122.39		0.01			
13.	PT. Kurnia Luwuk Sejati	495.81	58.99		16.04		45.28
14.	PT. Lestari Tadi Teladan	699.44					
15.	PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	5,372.77	801.30		362.11	453.55	
16.	PT. Sinergi Perkebunan Nusantara	9,952.99	760.37	53.93	209.04	530.87	68.47
17.	PT. Tamaco Graha Krida	794.94					
18.	PT. Wira Mas Permai	8,689.52	37.72	11.08	11.65		37.35
TOTAL		79,701.78	5,846.97	3,971.96	3,363.19	1,468.33	151.10

2. PR Dalam Kawasan

Tidak hanya Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negara, hasil klasifikasi tutupan sawit perkebunan rakyat (*smallholder*) diperoleh tutupan yang berada di dalam kawasan hutan. Luas tutupan sawit perkebunan rakyat yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 428,45 ha. Tutupan sawit perkebunan rakyat masing-masing tersebar di beberapa fungsi kawasan yaitu Kawasan suaka alam/Kawasan pelestarian alam (KSA/KPA), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Tutupan sawit perkebunan rakyat yang berada dalam areal kawasan hutan secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Tutupan Sawit di Dalam Kawasan Perkebunan Rakyat Tahun 2019

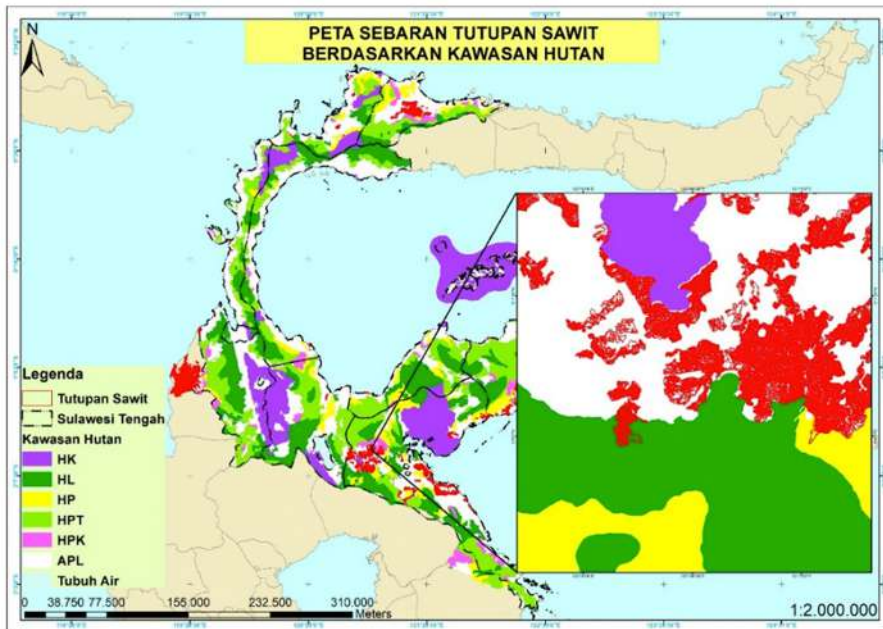
Kawasan Hutan	Luas (ha)
KSA/KPA	25,34
HL	23,21
HP	146,93
HPT	64,30
HPK	168,67
APL	4.360,10
Total	4.788,55

Sumber: Hasil Olahan (2019)

3. Tutupan Sawit Dalam Kawasan Hutan

Luas tutupan sawit secara keseluruhan yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 4.211,28 ha atau 5,83% dari total tutupan sawit Sulawesi Tengah 2019. Tutupan sawit di dalam kawasan Hutan dengan fungsi hutan produksi dapat dikonversi (HPK) memiliki luasan terbesar yaitu 2.064,09 ha. Tutupan sawit yang berada di dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 15 dan Gambar 6.

Gambar 6 Peta Sebaran Tutupan Sawit Berdasarkan Kawasan Hutan



Tabel 15 Tutupan Sawit di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2019

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Tutupan Sawit (ha)			
		TBM	TM	TTM	Total
1.	KSA/KPA	144,42	231,22	239,55	615,20
2.	HL	83,14	191,78	206,74	481,65
3.	HP	213,98	213,36	451,20	878,54
4.	HPT	45,91	56,92	68,96	171,79
5.	HPK	483,38	568,81	1.011,90	2.064,09
6.	APL	15.958,02	20.286,02	31.727,42	67.971,45
Total		16.928,85	21.548,11	33.705,76	72.182,73

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Salah satu kendala dalam pendugaan potensi penerimaan negara atas pajak perkebunan sawit adalah ketidakserasian data antar instansi. Selain itu, akurasi data yang dihasilkan oleh masing-masing instansi juga perlu untuk ditinjau kembali. Perbedaan data tutupan sawit antar instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 16.

1. Badan Pusat Statistik, Pusat Tahun 2018

Status Tutupan Pengusahaan/Wilayah Administrasi	Tutupan Sawit (ha)
PBN	—
PBS	71,609
PR	91,269
Total	162,878

2. Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Status Tutupan Pengusahaan/Wilayah Administrasi	Tutupan Sawit (ha)
Banggai Kepulauan	—
Banggai	9,661
Morowali	16,330
Poso	1,026
Donggala	10,776
Tolitoli	117
Buol	7,915
Pargi Moutong	440
Tojo Una-Una	—
Sigi	—
Banggai Laut	—
Morowali Utara	5,336
Palu	—
Total	51,601

3. Kementerian Pertanian Tahun 2018

Status Tutupan Pengusahaan/Wilayah Administrasi	Tutupan Sawit (ha)
PBN	—
PBS	98,192
PR	91,269
Total	189,461

Tutupan sawit yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) baik Pusat maupun Provinsi menggunakan metodologi yang sama. Data tutupan sawit Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) diperoleh oleh BPS dari hasil survey perusahaan perkebunan yang dilakukan dengan pencacahan secara lengkap terhadap seluruh administrator perkebunan per triwulan dan tahunan. Sementara data tutupan sawit Perkebunan Rakyat (PR) diperoleh BPS dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Meskipun metodologi BPS Pusat maupun Provinsi dalam perolehan data tutupan sawit sama, namun luasan tutupan sawit yang dihasilkan diantara keduanya menunjukkan selisih yang besar (Tabel 16).

Hal lain adalah data status perusahaan sawit di Sulawesi Tengah, baik yang dihasilkan oleh BPS maupun Kementerian Pertanian (Kementan) tidak menyebutkan adanya Perkebunan Besar Nasional (PBN). Padahal secara eksisting, terdapat PBN perkebunan sawit yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Morowali Utara (Dinas Perkebunan Sulawesi Tengah 2015).

Perbedaan informasi antar instansi berpotensi menimbulkan informasi yang tidak valid. Padahal informasi yang valid menentukan keputusan yang akan diambil agar tepat sasaran dan tepat guna. Kesalahan dalam menginformasikan tutupan sawit dan status pengusaannya berpotensi menimbulkan kegagalan dalam mengidentifikasi “obyek” dan “subyek” pajak.

Simpulan & Rekomendasi

Simpulan

- ▶ Luas keseluruhan tutupan sawit Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu 75.225,94 ha. Hasil dugaan produksi TBS perkebunan sawit secara keseluruhan di Sulawesi Tengah tahun 2019 adalah 297.136,31 ton. Penerimaan negara atas pajak (PBB dan PPN) perkebunan sawit di Sulawesi Tengah tahun 2019 yang diperoleh yaitu Rp 32.124.558.366,20.
- ▶ Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit besar swasta (PBS) di Sulawesi Tengah yang berhasil diidentifikasi adalah 19 HGU dengan luas 113.033,04 ha. Terdapat satu HGU perkebunan sawit besar negara (PBN) di Sulawesi Tengah yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) seluas 6.989,73 ha.
- ▶ Terdapat 18 perusahaan pemegang HGU baik perkebunan besar swasta (PBS) maupun perusahaan besar negara (PBN) yang berada di dalam kawasan hutan. Areal HGU PBS di dalam kawasan terluas adalah PT. Hardaya Inti Plantation (7.429,04 ha). Kemudian PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) sebagai PBN memiliki areal HGU di dalam kawasan hutan dengan total luasan 1.616,97 ha. Adapun luas tutupan sawit perkebunan rakyat yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 428,45 ha.
- ▶ Luas tutupan sawit secara keseluruhan yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 4.211,28 ha atau 5,83% dari total tutupan sawit Sulawesi Tengah 2019. Tutupan sawit di dalam fungsi kawasan hutan secara berurutan yaitu hutan produksi dapat dikonversi (HPK) 2.064,09 ha, hutan produksi (HP) 878,54 ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam (KSA/KPA) 615,20 ha, hutan lindung (HL) 481,65 ha dan hutan produksi terbatas (HPT) 171,79 ha.

- ▶ Metodologi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat maupun Provinsi dalam perolehan data tutupan sawit sama, namun luasan tutupan sawit yang dihasilkan diantara keduanya menunjukkan selisih yang besar. Hal lain adalah data status perusahaan sawit di Sulawesi Tengah, baik yang dihasilkan oleh BPS maupun Kementerian Pertanian (Kementan) tidak menyebutkan adanya Perkebunan Besar Nasional (PBN). Kesalahan dalam menginformasikan tutupan sawit dan status perusahaannya berpotensi menimbulkan kegagalan dalam mengidentifikasi “obyek” dan “subyek” pajak.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa harapan tim penulis untuk perbaikan perhitungan pajak sawit kedepan dalam mengoptimalkan penerimaan negara di sektor ini. Rekomendasi diberikan untuk instansi pemerintah agar:

1. Memperbaiki Informasi

Melakukan sinkronisasi data perizinan perkebunan sawit antar lembaga pemerintah dan level pemerintahan. Integrasi pendataan dan akurasinya dapat menjadi indikator kinerja pemerintah.

2. Memperkuat pengawasan

Transparan dan terbuka terhadap akses informasi publik. Selain itu melakukan review perizinan dan penegakan hukum.

3. Meningkatkan produktivitas

Untuk para pemangku kepentingan lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, perlu mendorong metodologi perhitungan penerimaan negara di sektor sawit berbasis penginderaan jauh dalam mengidentifikasi status/umur tanaman dan melakukan *overlay*.

Daftar Pustaka

- Abood SA, Lee JSH, Burivalova Z, Garcia-Ulloa J, Koh LP. 2015. Relative contributions of the logging, fiber, oil palm, and mining industries to forest loss in Indonesia. *Conservation Letters* 8(1): 58-67.
- Acosta P, Curt MD. 2019. Understanding the expansion of oil palm cultivation: A case-study in Papua. *Journal of Cleaner Production* 219(199-216).
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2018. *Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2020*. Palu: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Carlson KM, Curran LM, Ratnasari D, Pittman AM, Soares-Filho BS, Asner GP, Trigg SN, Gaveau DA, Lawrence D, Rodrigues HO. 2012. Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109(19): 7559-7564.
- CPI. 2015. Improving Land Productivity through Fiscal Policy: Early Insights on Taxation in the palm oil supply chain. *Climate Policy Initiative, San Francisco, CA*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2018. *Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- Index Mundi. 2020. Palm Oil Production by Country in 1000 MT. Diakses pada 9 Agustus 2020. <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil>
- [KPK DPP Komisi Pemberantasan Korupsi]. 2016. Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit [Thesis Type]. Jakarta: University.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 2015. Litbang Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Perkebunan, Lapan. Jakarta.
- Soedomo S, Kartodihardjo H, Hendrayanto, Wibowo AB, Adinugraha AG, Hadijah S, Prihatmaja H, Lewenussa A dan Prasetyo AR. 2018. *Tata kelola perkebunan sawit di Indonesia: studi kasus di provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Forci Development, 2018.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Tebet Utara II A No. 13
Jakarta Selatan, 12810 - Indonesia
Tlp. +62 21 835 2955
www.tuk.or.id